

ABSTRAK

Penelitian ini meneliti proses pembangunan Kota Surakarta dalam menciptakan inovasi kebijakan yang diduga mampu memberikan prospektif dalam jangka waktu panjang. Penciptaan inovasi kebijakan fokus pada nilai budaya yang bertujuan untuk menguatkan budaya dan keterampilan lokal sebagai kekuatan ekonomi kota dan masyarakat. Relokasi PKL di sekitar Taman Monumen Banjarsari ke Pasar Klitikan Notoharjo sebagai bukti keberhasilan inovasi kebijakan tersebut. Penelitian bertujuan mengkaji bagaimana bentuk inovasi kebijakan pembangunan berkelanjutan dan tata kelola pelaksanaan pemerintahan yang dilakukan tersebut. Pencapaian penelitian dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa bentuk inovasi kebijakan yang diciptakan merupakan integrasi dari segi (1) *Human system*, dimana adanya persamaan pemikiran tentang solusi penataan PKL yang terintegrasi antar stakeholder terkait dengan didukung sistem sosial berupa pendekatan yang tepat untuk meminimalisasikan konflik dan diperkuat dengan sistem pemerintah sebagai pedoman bagi keberlanjutan periode pemerintah selanjutnya. (2) *Support System*, dimana *action* dari sistem pemerintahan yang tidak hanya berkekuatan hukum, dengan penguatan ekonomi melalui sistem ekonomi dan perbaikan infrastruktur melalui sistem infrastruktur. (3) *Natural System*, merumuskan tujuan dalam mencetuskan inovasi kebijakan penataan PKL dengan budaya yaitu penataan dan pengembalian fungsi kawasan Monjari sebagai salah satu bentuk perwujudan perbaikan akan wajah Kota Surakarta.

Tata kelola penataan PKL di Kota Surakarta terjalin dengan partisipatif dan integrasi antar pelaku kepentingan dan berpengaruh pada keberhasilan implementasi inovasi kebijakan penataan PKL yang berkelanjutan di Kota Surakarta. Efektivitas mekanisme tata kelola pemerintah dalam penataan PKL Kota Surakarta tercipta karena (1) inisiator dan komitmen kepala daerah (Walikota), (2) perubahan *mindset* (pemerintah dan PKL) dengan pendekatan yang tepat sehingga terbangun kepercayaan dari semua stakeholder untuk ikut serta dalam perencanaan-pelaksanaan-pengawasan-monitoring evaluasi penataan PKL, (3) perubahan sistem yang lebih kepada reformasi birokrasi yang dilakukan oleh Pemkot Surakarta diikuti dengan membuat kebijakan yang terdokumenkan seperti Perda tentang penataan PKL, Perwali, RPJM yang didalamnya juga membentuk sistem perekonomian, infrastruktur, dan memperhatikan struktur lingkungan, (4) mekanisme implementasi Penataan PKL dilakukan secara berkesinambungan dan terintegrasi antar stakeholder terkait satu sama lain, (5) pengelolaan inovasi anggaran dengan “Pangkas Anggaran” dan manajemen fokus tujuannya untuk pemanfaatan anggaran yang berdampak ke semua bidang, terutama untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Peran kepala daerah diikuti dengan penguatan sistem yang terdokumen sebagai pedoman pelaksanaan kebijakan penataan PKL akan menjamin keberlanjutan implementasi kebijakan penataan PKL pada periode berikutnya. Keberhasilan pemerintahan saat ini dijadikan tolok ukur bagi kepemimpinan berikutnya sebagai bentuk formulasi inovasi kebijakan pembangunan berkelanjutan.

Kata Kunci: Pembangunan Berkelanjutan, Implementasi inovasi kebijakan, Tata kelola pemerintahan